

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum lokasi penelitian

3.1.1 Sejarah singkat kantor camat gomo

Kecamatan Gomo merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Nias Selatan. Sebelum terbentuknya Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias induk. Sekitar tiga tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1948, Kecamatan Gomo mulai berdiri dan kemudian disahkan pada tahun 1949 dengan jumlah 19 desa. Camat pertama yang memimpin Kecamatan Gomo adalah **Ama Gahela**.

Berdasarkan sejarah Nias, khususnya di wilayah Gomo, diyakini bahwa daerah ini merupakan tempat pertama nenek moyang orang Nias bermukim, yakni di Desa Sifalago Gomo, yang kini telah menjadi bagian dari Kecamatan Boronadu. Untuk mempercepat pembangunan serta memudahkan pelayanan administrasi masyarakat, Kecamatan Gomo kemudian dimekarkan menjadi tujuh kecamatan, yaitu: Kecamatan Gomo, Susua, Umbunasi, Boronadu, Mazo, Idanotae, dan Ulu Idanotae.

Secara administratif, Kabupaten Nias Selatan saat ini memiliki 35 kecamatan, termasuk Kecamatan Gomo yang memiliki luas wilayah 57,183 km². Kecamatan ini membawahi 11 desa yang masing-masing memiliki kepala desa, masa pengangkatan (TMT), serta akhir masa jabatan, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1Nama Kepala Desa

No	Desa	Nama kepala desa	L/P	Pengangkatan TMT	Berakhir Masa Jabatan
1	Sifaoroasi Gomo	Tohuasa Telambanua S.pd	L	25 November 2019	25 November 2025
2	Orahili Sibohou	Martinus Telambanua	L	25 November 2019	25 November 2025
3	Doli-doli Idanotae	Soarota Tafonao A.ma.Pd.Sd	L	25 November 2019	25 November 2025
4	Umbu Orahua	Aroziduhu Lase	L	25 November 2019	25 November 2025
5	Gunung Gabungan	Sentosa Giawa	L	25 November 2019	25 November 2025
6	Hilianaa Gomo	Yumin Telambanua	L	25 November 2019	25 November 2025
7	Lolosoni	Buala Nasokhi Lase, SE	L	25 November 2019	25 November 2025
8	Orahili Gomo	Desman Wilyanus Telambanua S.pd	L	25 November 2019	25 November 2025
9	Tanonikoo	Saferman Hulu S.pd	L	25 November 2019	25 November 2025
10	Sukamaju Mohili	Yulianus Laia S.pd	L	25 November 2019	25 November 2025
11	Lawa- lawa Luo Gomo	Saronafaudu Hia	L		25 November 2025

3.1.2 Visi dan Misi Kantor Camat Gomo

a. Visi

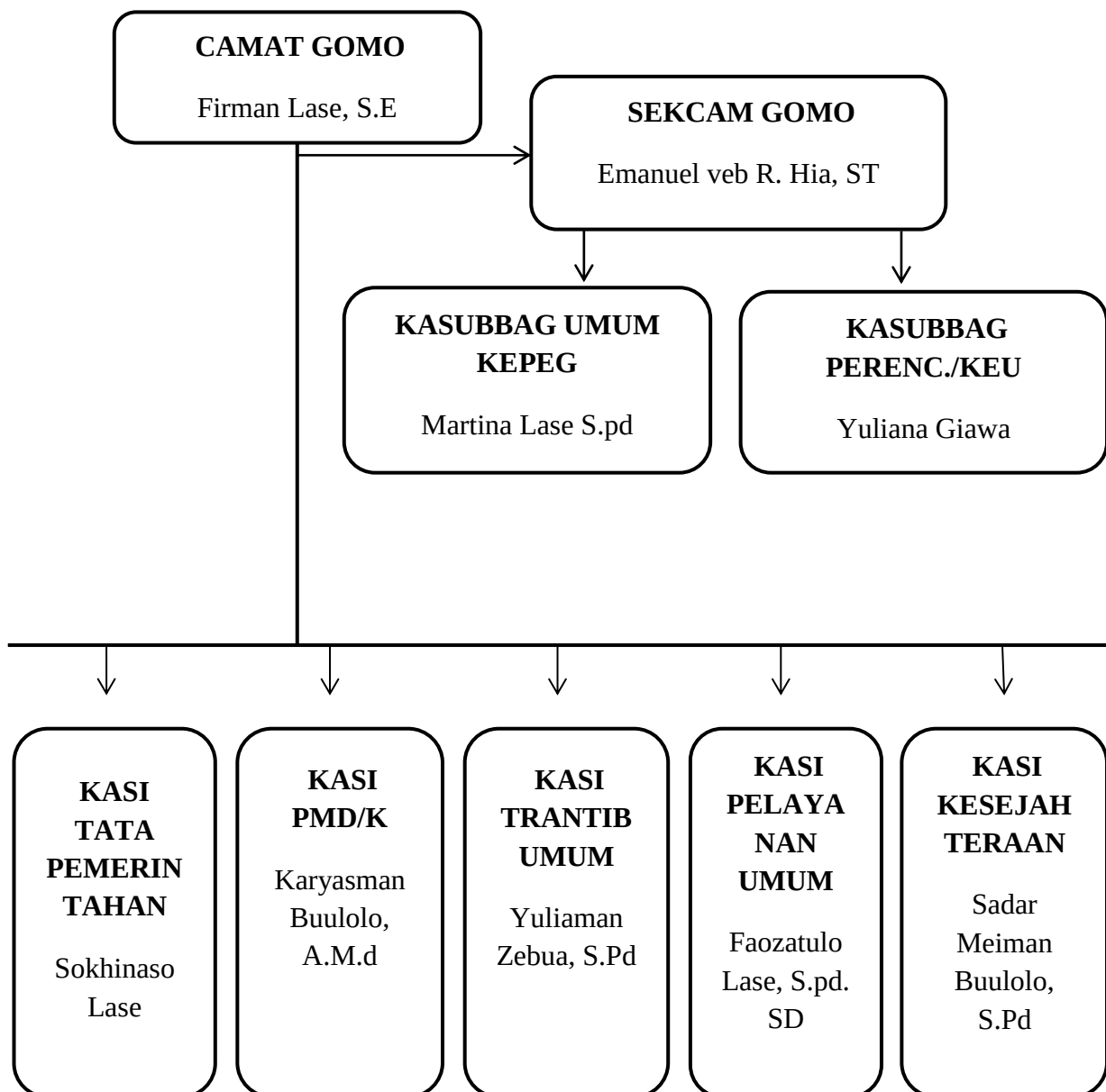
Membangun Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Berkelanjutan Dan Lestari Berkeadaban

b. Misi

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian untuk siap merintis usaha sendiri melalui pendidikan yang berkualitas.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Menjunjung tinggi penegakan hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintah daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan semangat kebinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7. Membangun infrastruktur diberbagai sektor untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias

Gambar 3. 1 Struktur organisasi



Tabel 3. 2 Uraian Tugas Camat Gomo

Jabatan	Nama Pejabat	Uraian Tugas
Camat	Firman Lase, S.E	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan; membina desa/kelurahan; mengawasi pelayanan publik.
Sekcam	Emanuel veb R. Hia, ST	Membantu camat dalam koordinasi administrasi; mengkoordinasikan kegiatan subbag/subseksi; menyusun laporan kegiatan & keuangan.
Kasubbag Umum & Kepegawaian	Martina Lase S.pd	Mengelola administrasi kepegawaian; tata usaha, surat-menyurat, arsip, perlengkapan kantor; urusan rumah tangga kantor camat.
Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Yuliana Giawa	Menyusun rencana kerja kecamatan; mengelola administrasi keuangan; membuat laporan anggaran; monitoring & evaluasi kegiatan.
Kasi Tata Pemerintahan	Yuliana Giawa	Membina pemerintahan desa/kelurahan;

		administrasi kependudukan, pertanahan, kewilayahan; menyelesaikan permasalahan pemerintahan desa.
Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat & Desa)	Karyasman Buulolo, A.M.d	Membina pembangunan desa; pemberdayaan masyarakat; memfasilitasi program bantuan pemerintah ke desa.
Kasi Trantib Umum	Yuliaman Zebua, S.Pd	Menjaga ketertiban & keamanan; membina Satlinmas; koordinasi keamanan dengan TNI/POLRI.
Kasi Pelayanan Umum	Faozatulo Lase, S.pd. SD	Menangani pelayanan administrasi umum & kependudukan; melayani perizinan dan non-perizinan.
Kasi Kesejahteraan	Sadar Meiman Buulolo, S.Pd	Membina urusan sosial, budaya, dan keagamaan; memfasilitasi program kesehatan, pendidikan & bantuan sosial.

Dari struktur di atas, bisa dilihat bahwa Camat sebagai pimpinan terbantu oleh Sekcam, lalu dibantu dua subbagian (Umum/Kepegawaian serta

Perencanaan/Keluangan), dan empat seksi teknis (Tata Pemerintahan, PMD, Trantib, Pelayanan Umum, dan Kesejahteraan).

3.2 Pembahasan

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dan kesesuaian SAKD PP Nomor 71 Tahun 2010 di Kantor Camat Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan

3.2.1. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo

Kecamatan Gomo Kabupaten

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI di Kantor Camat Gomo telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta pedoman yang diberikan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Selatan. Dalam praktiknya, Kantor Camat Gomo menggunakan basis akrual, yaitu pendapatan dicatat ketika hak atau kewajiban muncul meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Proses penerapan di kecamatan ini dimulai dengan pencatatan setiap transaksi keuangan melalui dokumen sumber seperti SPP, SPM, kwitansi, dan bukti setor, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menampilkan ringkasan mengenai asal, distribusi, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini juga memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Adapun komponen utama yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. **Pendapatan** : seluruh penerimaan kas di Kantor Camat Gomo yang meningkatkan ekuitas dana serta menjadi hak pemerintah kecamatan tanpa adanya kewajiban untuk dikembalikan.
- b. **Belanja** : setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan Kantor Camat Gomo dalam satu tahun anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gomo.

- c. **Selisih** : perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk Kantor Camat Gomo dalam APBD dengan realisasi belanja yang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Selisih ini dapat menunjukkan apakah anggaran digunakan sepenuhnya, masih terdapat sisa (*surplus*), atau justru terjadi kekurangan anggaran (*defisit*).

Tabel 3. 3 LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase realisasi %
Pendapatan				
Pendapatan Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	0
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	0
Retribusi Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	0
Total Pendapatan	Rp. 24.000.000	0,00	-Rp. 24.000.000	0
Belanja				
Belanja Daerah	Rp. 161.080.190	Rp. 55.770.485	-Rp. 105.309.705	34,62
Belanja Operasi	Rp. 161.080.190	Rp. 55.770.485	-Rp. 105.309.705	34,62
Belanja Pegawai	Rp. 380.000	0,00	-Rp. 380.000	0
Barang dan Jasa	Rp. 161.079.810	Rp. 55.770.485		34,62
Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0
Total Belanja	Rp. 483.620.190	Rp. 167.311.485	-Rp. 316.308.705	34,59
Surplus/Defisit	Rp. 153.080.190	Rp. 55.770.485	Rp. 97.309.707	36,43

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Gomo untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025, terlihat bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada semester pertama tahun 2025 masih belum mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada sisi pendapatan, anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp 24.000.000 tidak terealisasi sama sekali hingga pertengahan tahun, sehingga tingkat realisasinya hanya mencapai 0%. Kondisi ini mencerminkan bahwa target pendapatan tidak tercapai serta menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan, baik dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari penerimaan lainnya. Dari sisi belanja, total anggaran belanja sebesar Rp 483.620.190 telah terealisasi sebesar Rp 316.308.705 atau sekitar 65,43% dari target anggaran. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anggaran belanja belum terserap, yang dapat diartikan adanya keterlambatan pelaksanaan program atau penundaan kegiatan. Meskipun rendahnya penyerapan dapat mencerminkan efisiensi, namun dalam konteks pelaksanaan program kerja, hal ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, kondisi surplus/defisit pada periode ini menunjukkan defisit sebesar Rp 316.308.705. Defisit ini disebabkan oleh tidak adanya realisasi pendapatan, sementara belanja tetap dilakukan. Keadaan ini berimplikasi pada ketergantungan terhadap sumber pembiayaan lain di luar pendapatan murni. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran Kecamatan Gomo pada periode 1 Januari–30 Juni 2025 belum optimal. Diperlukan upaya perbaikan dalam strategi pencapaian pendapatan serta percepatan pelaksanaan program kerja agar target anggaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu laporan pokok dalam akuntansi pemerintahan yang berisi informasi mengenai seluruh pendapatan, beban, surplus atau defisit dari aktivitas operasional, serta pos-pos luar biasa dalam satu periode pelaporan.

Pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kantor Camat Gomo, laporan ini berfungsi untuk menunjukkan kinerja keuangan berbasis akrual, di mana pendapatan dan beban dicatat pada saat timbulnya transaksi, bukan ketika kas diterima atau dikeluarkan.

Tabel 3. 4 Laporan Operasional

Uraian	2025	2024	Selisih	Persentase%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Daerah	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Jasa Umum	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Restribusi Los	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8. 000.000	100
Total Pendapatan	0,00	Rp. 40.000.000	-Rp. 40.000.000	100
Beban	Rp. 55.770.485	Rp. 332.610.210	-Rp. 276.839.725	83,23
Beban Operasi	Rp. 55.770.485	Rp. 332.610.210	-Rp. 272.038.975	82,98
Beban Pegawai	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100

Beban Honorarium	0,00	Rp. 2 5.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	0,00	Rp. 2 5.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Barang dan Jasa	Rp. 55.770.485	Rp. 302.489.460	-Rp. 246.718.975	81,56
Beban Barang	Rp. 14.120.485	Rp. 147.281.460	-Rp. 133.160.975	90,41
Beban Barang Pakai Habis	Rp. 14.120.485	Rp. 144.276.860	-Rp. 130.156.375	90,21
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 8.870.485	Rp. 55.189.750	-Rp. 46.319.265	83,92
Beban Alat Bahan Cetak	0,00	Rp. 15.622.110	-Rp. 15.622.110	100
Beban Alat Benda Pos	0,00	Rp. 2.000.000	-Rp. 2.000.000	100
Beban Alat Listrik	0,00	Rp. 3.866.400	-Rp. 3.866.400	100
Beban Makanan dan Minum Rapat	Rp. 5.250.000	Rp. 32.690.600	-Rp. 27.448.600	83,94
BMM Jamuan Tamu	0,00	Rp. 12.600.000	-Rp. 12.600.000	100
Beban Paskibraka	0,00	Rp. 22.300.000	-Rp. 22.300.000	100
Beban Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	Rp. 3.004.000	-Rp. 3.004.000	100
Beban Peralatan, Mesin dan Alat Pembersih	0,00	Rp. 3.004.000	-Rp. 3.004.000	100
Beban Jasa	Rp. 17.500.000	Rp. 46.000.000	-Rp. 28.500.000	61,95
Beban Jasa Kantor	Rp.	Rp.	-Rp.	61,95

	17.500.000	46.000.000	28.500.000	
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	Rp. 10.000.000	-Rp. 10.000.000	100
Beban Jasa Administrasi	Rp. 5.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 31.000.000	86,11
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 5.000.000	0,00	Rp. 5.000.000	100
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 7.500.000	0,00	Rp. 7.500.000	1 00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 24.150.000	Rp. 109.208.000	-Rp. 85.058.000	77,88
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp. 24.150.000	Rp. 109.208.000	-Rp. 85.058.000	77,88
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	Rp. 15.988.000	-Rp. 15.988.000	100
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	Rp. 24.150.000	Rp. 93.220.000	-Rp. 69.070.000	74,09
Jumlah Beban Oprasi	Rp. 55.770485	Rp. 327.809.460	-Rp. 272.038.975	82,98
Beban Penyusutan dan Armotisasi	0,00	Rp. 4.800.750	-Rp. 4.800.750	100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Komputer	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	Rp. 2.139.000	-Rp. 2.139.000	100

Berdasarkan data kinerja keuangan, total pendapatan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 0,00, sedangkan pada tahun 2024 mencapai Rp 40.000.000. Dengan demikian, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 40.000.000. Penurunan ini

sepenuhnya disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada pos retribusi daerah yang tidak terealisasi sama sekali pada tahun 2025.

Dari sisi beban, total beban pada tahun 2025 sebesar Rp 55.770.485, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp 332.610.210, sehingga terdapat selisih penurunan sebesar Rp 276.839.725. Selisih terbesar terdapat pada beban barang dan jasa, yang berkurang sebesar Rp 246.718.975. Selain itu, beban perjalanan dinas berkurang sebesar Rp 85.058.000, dan beban penyusutan berkurang Rp 4.800.750. Beberapa pos beban yang terdapat pada tahun 2024, seperti beban pegawai, beban jamuan tamu, beban Paskibraka, beban alat bahan cetak, serta beberapa jenis beban jasa, tidak lagi muncul pada tahun 2025.

Dengan demikian, meskipun terdapat penghematan yang cukup besar di sisi beban, penurunan pendapatan sebesar Rp 40.000.000 hingga menjadi Rp 0,00 pada tahun 2025 menjadi catatan penting yang perlu dianalisis lebih lanjut, karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan kegiatan pemerintahan di tahun berjalan.

3.2.2 Kesesuaian SAKD Kantor Camat Gomo

Di tingkat kecamatan, termasuk **Kantor Camat Gomo**, sistem akuntansi yang diterapkan umumnya mengikuti **sistem akuntansi berbasis akrual** sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Namun, implementasinya memiliki kelebihan sekaligus kendala:

Tabel 3. 5 Kesesuaian SAKD

Kriteria PP 71/2010	Penjelasan PP 71/2010	Kondisi di Kantor Camat Gomo	Kesesuaian
Relevan	Laporan keuangan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, evaluasi, dan akuntabilitas publik.	Laporan keuangan digunakan sebagai dasar evaluasi anggaran kecamatan, pembangunan desa, dan pelayanan masyarakat.	☐ Sesuai
Andal	Informasi jujur, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi.	Pencatatan transaksi keuangan dilakukan sesuai aturan BPKD dengan bukti transaksi (SPJ,	Sebagian sesuai (kendala

Kriteria PP 71/2010	Penjelasan PP 71/2010	Kondisi di Kantor Camat Gomo	Kesesuaian
		kwitansi, dll.), namun kadang ada keterlambatan pelaporan.	teknis)
Dapat dibandingkan	Laporan bisa dibandingkan antar periode & antar entitas pemerintah.	Format laporan mengikuti SAP Kabupaten Nias Selatan, sehingga dapat dibandingkan dengan kecamatan lain maupun tahun sebelumnya.	☐ Sesuai
Dapat dipahami	Informasi harus jelas dan mudah dimengerti pengguna laporan.	Laporan disusun dengan format standar (LRA, Neraca, LO, LAK, CaLK). Namun pemahaman aparatur masih terbatas karena latar belakang akuntansi belum merata.	Sebagian sesuai
Basis Akrua	Pencatatan berbasis akrual (mencatat hak & kewajiban, bukan hanya kas).	Mulai diterapkan sesuai SAP. Namun, praktiknya masih dominan kas menuju akrual karena keterbatasan SDM & aplikasi.	Belum sepenuhnya sesuai

1. Relevansi

Kualitas laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Di Kantor Camat Gomo, laporan keuangan memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena digunakan sebagai dasar untuk menilai realisasi anggaran, pelaksanaan pembangunan desa, dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun memberikan kontribusi nyata dalam perencanaan dan pengendalian keuangan.

2. Keandalan

Informasi yang andal harus disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material. Kantor Camat Gomo menyusun laporan keuangan berdasarkan dokumen sumber (SPJ, kwitansi, bukti belanja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya) yang diverifikasi secara berjenjang oleh aparat

kecamatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban dan keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan keandalan laporan masih belum optimal meskipun secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan PP 71/2010.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan sebaiknya dapat dibandingkan baik antarperiode maupun antarinstansi. Di Kantor Camat Gomo, laporan keuangan disusun menggunakan format standar yang ditetapkan pemerintah kabupaten sesuai dengan SAP berbasis akrual. Hal ini memungkinkan laporan kecamatan untuk dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan kecamatan lain di Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, dari sisi keterbandingan, penerapan sistem akuntansi di Kantor Camat Gomo sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.

4. Dapat dipahami

Kriteria ini menuntut agar laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna, baik masyarakat umum maupun pihak pemeriksa. Laporan keuangan di Kantor Camat Gomo terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun dalam format standar. Hal ini mendukung keterpahaman bagi pengguna laporan. Namun, karena keterbatasan pemahaman sebagian aparatur kecamatan yang tidak berlatar belakang akuntansi, proses penyusunan laporan sering bergantung pada bimbingan teknis dari kabupaten.

5. Basis Akrual

PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan pemerintah menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Kantor Camat Gomo pada dasarnya sudah menerapkan sistem berbasis akrual sesuai dengan aturan, karena pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi keuangan daerah yang dikendalikan oleh kabupaten. Namun, dalam praktiknya, sebagian aparatur masih lebih familiar dengan pencatatan berbasis kas, sehingga implementasi basis akrual masih belum sepenuhnya optimal.

3.2.3 Komponen laporan keuangan pada kantor camat Gomo.

Karena Kantor Camat termasuk dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), laporan keuangannya menjadi bagian dari laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten. Meski demikian, di tingkat kecamatan tetap diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan format SAP.

Komponen Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Gomo sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- a. Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan
- b. Di Kantor Camat Gomo, komponen utama meliputi:
 - a) Pendapatan transfer dari pemerintah kabupaten (karena kecamatan tidak memiliki PAD sendiri).
 - b) Belanja operasional, seperti gaji pegawai, belanja barang/jasa, perjalanan dinas, ATK, listrik, telepon.
 - c) Belanja modal, misalnya pengadaan peralatan kantor, komputer, kendaraan dinas.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

- a. Menggambarkan perubahan saldo anggaran pada awal dan akhir tahun.
- b. Berfungsi untuk memantau sisa anggaran yang belum dimanfaatkan di Kantor Camat Gomo.

3. Neraca

- a. Menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu (misalnya 31 Desember).
- b. Komponen yang tercatat di Kantor Camat Gomo antara lain:
 - a) Aset: tanah, gedung kantor camat, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, perlengkapan kantor.
 - b) Kewajiban: tagihan listrik/telepon yang belum dibayar, utang belanja.
 - c) Ekuitas: selisih antara aset dan kewajiban.

4. Laporan Operasional (LO)

- a. Menunjukkan seluruh pendapatan-LO dan beban selama periode tertentu, berbasis akrual.
- b. Di Kantor Camat Gomo, komponen utama:
 - a) Pendapatan-LO: diakui dari transfer pemerintah daerah.
 - b) Beban: mencakup gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa, penyusutan aset, serta biaya operasional kantor

5. Laporan arus kas (LAK)

- a. Menampilkan pergerakan kas masuk dan kas keluar sepanjang satu periode pelaporan.
- b. Pada Kantor Camat Gomo, arus kas dikelompokkan dalam:
 - a) Aktivitas operasi: penerimaan kas dari transfer, pembayaran belanja rutin.
 - b) Aktivitas investasi aset: pengeluaran kas untuk belanja modal.

6. Laporan perubahan ekuitas (LPE)

- a. Menggambarkan perubahan ekuitas sepanjang satu periode pelaporan.
- b. Pada kantor camat, perubahan ekuitas terjadi karena surplus/defisit operasional serta koreksi lainnya.

7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

- a. Memuat penjelasan secara naratif serta rincian dari angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan.
- b. Pada Kantor Camat Gomo, CaLK menjelaskan:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan.
 - b) Rincian belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
 - c) Informasi tambahan mengenai aset tetap (misalnya jumlah kendaraan dinas, komputer, dan peralatan)

3.3 Hasil Penelitian

3.3.1. Hasil Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data adalah wawancara, Pada tanggal 12 Agustus 2025 Peneliti melakukan wawancara Dengan Ibu Yuliana Giawa Sebagai Kasubbag Keuangan di Kantor Camat Mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Berikut Adalah Hasil Wawancaranya :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo?

“Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo sudah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam praktiknya, setiap transaksi dicatat tidak hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan, tetapi juga ketika hak dan kewajiban timbul. Misalnya, apabila ada belanja barang dan jasa, pencatatan dilakukan ketika dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sudah diverifikasi meskipun pembayaran belum dilakukan sepenuhnya.”

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual?

“Kendala yang kami hadapi adalah masih kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap teknis pencatatan berbasis akrual. Banyak pegawai yang terbiasa dengan sistem kas (cash basis), sehingga perlu pelatihan khusus. Selain itu, sarana pendukung seperti aplikasi keuangan terkadang mengalami gangguan jaringan.”

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan akuntansi akrual?

“Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan dukungan berupa bimbingan teknis (bimtek) dan supervisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, ada juga pendampingan dari inspektorat dalam hal pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan.”

4. Bagaimana dampak penerapan akuntansi akrual terhadap laporan keuangan kantor camat Gomo?

“Dengan akuntansi akrual, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja dapat terlihat lebih jelas. Hal ini membantu camat dalam mengambil keputusan dan juga memudahkan proses audit.”

5. Bagian mana yang paling sulit diterapkan dalam sistem akrual (misalnya penyusutan aset, piutang, kewajiban)?

“Bagian yang paling sulit diterapkan dalam sistem akrual di Kantor Camat Gomo adalah pencatatan penyusutan aset tetap. Hal ini disebabkan karena data aset yang ada belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, terutama terkait nilai perolehan dan umur manfaat. Selain itu, pencatatan piutang dan kewajiban juga menjadi kendala karena selama ini transaksi lebih sering dicatat berbasis kas, sehingga pengakuan hak dan kewajiban masih belum konsisten sesuai dengan standar akrual. Kesulitan ini juga diperparah oleh

keterbatasan sumber daya manusia yang belum seluruhnya menguasai akuntansi berbasis akrual.”

6. Apa harapan ke depan terkait penerapan sistem ini?

“Harapan kami adalah agar seluruh aparat kecamatan mendapat pemahaman yang lebih baik melalui pelatihan rutin. Selain itu, kami berharap ada penyempurnaan aplikasi akuntansi agar lebih mudah digunakan dan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan.”

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Keuangan di Kantor Camat Gomo, diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada dasarnya sudah dijalankan sesuai ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**. Sistem akuntansi berbasis akrual ini mencatat setiap transaksi tidak hanya saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi juga ketika hak dan kewajiban timbul. Misalnya, untuk pengeluaran belanja barang dan jasa, pencatatan dilakukan setelah dokumen pertanggungjawaban diverifikasi meskipun pembayaran belum sepenuhnya direalisasikan.

Dalam pelaksanaannya, aparat kecamatan menghadapi beberapa kendala. Kendala utama adalah terbatasnya pemahaman teknis tentang akuntansi berbasis akrual, karena sebagian aparat sebelumnya lebih familiar dengan sistem berbasis kas. Selain itu, sarana pendukung seperti aplikasi keuangan kadang mengalami masalah teknis, terutama gangguan jaringan, sehingga memengaruhi kelancaran proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek), supervisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam proses pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat kecamatan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual secara tepat dan berkesinambungan. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Camat Gomo. Laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyajian informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta belanja dapat disajikan secara lebih jelas, sehingga mempermudah pimpinan kecamatan dalam pengambilan keputusan serta mendukung proses audit yang dilakukan oleh pihak terkait. Adapun harapan ke depan adalah agar seluruh aparat

kecamatan memperoleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang lebih intensif, sehingga pemahaman mengenai sistem akuntansi berbasis akrual semakin baik. Selain itu, diperlukan penyempurnaan pada aplikasi keuangan yang digunakan agar lebih praktis dan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan. Dengan demikian, tujuan utama penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance, dapat terwujud secara optimal.

Menurut Sugiyono (2018: 231), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi dari informan yang memiliki kompetensi. Berdasarkan teori tersebut, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk **wawancara semi-terstruktur**, yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kebebasan bagi informan untuk menjawab sesuai pengalaman mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- a) **Penerapan akrual** sudah sesuai dengan SAP (PP No.71 Tahun 2010).
- b) **Kendala utama** adalah keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, dan lemahnya sistem informasi.
- c) **Solusi** yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur sistem keuangan.

Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih memerlukan upaya perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung.

3.3.2 Kelebihan dan Kendala Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo

1. Kelebihan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo
 - a. **Transparansi lebih baik** – setiap transaksi keuangan dapat dicatat lebih rinci, tidak hanya saat kas diterima atau dibayarkan.
 - b. **Akuntabilitas meningkat** – laporan keuangan dapat menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kecamatan secara lebih jelas.
 - c. **Informasi lebih lengkap** – laporan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan arus kas, tetapi juga kondisi keuangan secara menyeluruh (misalnya adanya piutang atau kewajiban yang belum dilunasi).

- d. **Mendukung pengambilan keputusan** – pimpinan kecamatan bisa mengetahui kondisi riil keuangan sehingga lebih tepat dalam menentukan kebijakan.
 - e. **Kesesuaian dengan regulasi** – penerapan ini mengikuti ketentuan **PP No. 71 Tahun 2010**, sehingga laporan keuangan kecamatan lebih standar dan sejalan dengan aturan pemerintah.
2. Kendala Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo
- a. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)** – tidak semua staf keuangan memahami secara mendalam konsep akuntansi berbasis akrual, sehingga masih terjadi kesalahan pencatatan.
 - b. **Kesulitan dalam pengelolaan aset** – banyak aset kecamatan belum memiliki data nilai perolehan yang jelas, sehingga penyusutan sulit dihitung secara akurat.
 - c. **Piutang dan kewajiban kurang terdokumentasi** – pencatatan piutang dan kewajiban belum optimal karena biasanya baru diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan.
 - d. **Keterbatasan sarana dan prasarana** – jaringan internet dan perangkat lunak pendukung (misalnya SIMDA/SIPKD) kadang tidak berjalan optimal di tingkat kecamatan.
 - e. **Kurangnya monitoring dan evaluasi rutin** – pengawasan dari instansi terkait belum dilakukan secara konsisten, sehingga kendala teknis sering berulang.

3.3.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 3. 6 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Terdahulu	Temuan Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian di Kantor Camat Gomo	Persamaan/Perbedaan
1	M. Randy & A. Hasty (2021)	SDM dan teknologi informasi	SDM masih terbatas, pegawai	Sama-sama menekankan pentingnya SDM & TI

		berpengaruh terhadap penerapan akrual	belum terbiasa dengan akrual; keterbatasan aplikasi SIMDA	
2	Putra & Varina (2021)	SAP akrual di Kota Bengkulu sudah berjalan, tapi perlu peningkatan kuantitas/kualitas SDM	Kantor Camat Gomo masih terkendala kualitas SDM dalam memahami akrual	Persamaan: SDM jadi faktor dominan; Perbedaan: di Bengkulu sudah berjalan lebih baik
3	Alrahim & Wibowo (2022)	Laporan akrual bermanfaat untuk pengambilan keputusan	Di Gomo, laporan keuangan akrual mulai disusun, tapi belum optimal mendukung pengambilan keputusan	Persamaan: akrual memberi manfaat; Perbedaan: Gomo masih terbatas penggunaannya
4	Feni Pirani dkk. (2023)	SAP akrual tidak berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan; faktor pengawasan lebih berperan	Di Gomo, kualitas laporan masih rendah karena keterbatasan SDM dan pengawasan internal kurang	Sama-sama menekankan pentingnya pengawasan selain penerapan akrual

5	Satya (2023)	Faktor komitmen pimpinan, regulasi, TI, dan SDM memengaruhi penerapan akrual di Jawa Barat	Di Gomo, komitmen pimpinan ada, tapi SDM & sarana sangat terbatas	Persamaan: faktor kunci sama; Perbedaan: di Gomo kendala lebih dominan karena level kecamatan
---	--------------	--	---	---

Dengan tabel ini, terlihat bahwa hasil penelitian Saya **konsisten dengan penelitian terdahulu**, namun memberikan kontribusi baru bahwa di **tingkat kecamatan**, hambatan penerapan akuntansi akrual lebih kompleks dibandingkan pemerintah kabupaten/provinsi.

Hasil penelitian di Kantor Camat Gomo menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual telah dijalankan sesuai ketentuan **PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan pemahaman aparatur dalam pencatatan aset tetap, kewajiban, dan piutang, serta dukungan teknologi informasi yang belum sepenuhnya optimal.

Jika dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), maka dapat dipahami bahwa faktor sumber daya manusia, komunikasi, dan struktur birokrasi masih berpengaruh besar dalam keberhasilan penerapan akuntansi akrual di tingkat kecamatan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang ada dalam tabel penelitian di bab sebelumnya menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1. Putra & Varina (2021):** menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Kota Bengkulu berjalan sesuai aturan, namun kapasitas SDM masih rendah. Hasil ini konsisten dengan kondisi di Kantor Camat Gomo yang juga mengalami kendala serupa.
- 2. Alrahim & Wibowo (2022):** menyatakan bahwa laporan keuangan akrual digunakan untuk pengambilan keputusan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian di Kantor Camat Gomo, di mana laporan masih lebih dominan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

3. **Feni Pirani dkk. (2023):** menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara pengawasan internal memiliki peran yang lebih dominan. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Kantor Camat Gomo, di mana meskipun sistem akrual telah diterapkan, kualitas laporan keuangan tetap sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan.
4. **Satya (2023):** menekankan pentingnya komitmen pimpinan, regulasi, teknologi informasi, dan SDM dalam mendukung akuntansi akrual. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kondisi serupa, di mana regulasi dan komitmen pimpinan ada, tetapi dukungan teknologi dan kapasitas SDM masih terbatas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori dan sebagian besar penelitian terdahulu, serta menegaskan bahwa faktor kunci keberhasilan penerapan akuntansi akrual di tingkat kecamatan terletak pada peningkatan kualitas SDM, dukungan sistem informasi, pengawasan internal, dan komitmen pimpinan.